

Dilema Implementasi Koperasi Desa Merah Putih: Antara Kewajiban Administratif dan Partisipasi Masyarakat di Desa Pakisputih

Sheylomitha Suryaning Putri¹

Risalatu Latifah²

Fatkha Tsaqif Awangga³

Elok Nida Purwita⁴

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

sheylomitha.suryaning.putri@mhs.uingusdur.ac.id

risalatu.latifah@mhs.uingusdur.ac.id

fatkha.tsaqif.awangga@mhs.uingusdur.ac.id

elok.nida.purwita@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The government mandates the establishment of the Merah Putih Village Cooperative (KDMP) as a pillar of the village economy and an administrative requirement for the disbursement of village funds. However, its implementation in Pakisputih Village faces a dilemma: despite having formal legality, including an act of establishment and an organizational structure, the cooperative has not been able to operate effectively. This study aims to identify the factors causing the operational stagnation of the KDMP and to analyze the level of community participation and understanding regarding it. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation and informal interviews with village officials and various community groups during Student Community Service (KKN) activities. The results indicate that the primary cause of the cooperative's non-operation is a combination of two factors. First, the lack of a clear business direction, as many potential business units already exist and the savings and loan option was rejected due to the high risk of bad credit. Second, the low level of community understanding and participation, with residents tending to hold a negative perception of cooperatives, viewing them as synonymous with risky savings and loan businesses. The combination of these factors creates stagnation, reducing the cooperative to a mere fulfillment of administrative obligations without a real economic function. An in-depth study of local potential and continuous socialization are required to change public perception and optimize the cooperative's function.

Keyword: Microfinance, small and micro enterprises, Poorest of the poor

ABSTRAK

Pemerintah mengamanatkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi desa dan syarat administratif untuk pencairan dana desa. Namun, implementasinya di Desa Pakisputih menghadapi dilema: meskipun telah memiliki legalitas formal seperti akta pendirian dan struktur organisasi, koperasi ini belum dapat beroperasi secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stagnasi operasional KDMP serta menganalisis tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadapnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara informal dengan perangkat desa serta berbagai kelompok masyarakat selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakoperasian koperasi adalah kombinasi dua faktor. Pertama, ketidakjelasan arah usaha, di mana banyak unit

bisnis potensial sudah ada dan opsi simpan pinjam ditolak karena tingginya risiko kredit macet. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, yang cenderung memandang koperasi secara negatif dan identik dengan usaha simpan pinjam yang berisiko. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan stagnasi, menjadikan koperasi sebatas pemenuhan kewajiban administratif tanpa fungsi ekonomi yang nyata. Diperlukan kajian potensi lokal yang mendalam dan sosialisasi berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mengoptimalkan fungsi koperasi.

Kata kunci: Keuangan mikro, usaha mikro dan kecil, masyarakat berpenghasilan rendah

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Melalui kewenangan tersebut, desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta kelembagaan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya pembangunan nasional yang merata dan inklusif.

Sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi wadah ekonomi produktif berbasis komunitas desa. Koperasi ini menjunjung prinsip kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, dan partisipasi kolektif. Kehadirannya diharapkan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi desa, dan mendukung terbentuknya desa mandiri dan berdaya. Program ini juga dipandang relevan untuk menjawab tantangan globalisasi dan ketergantungan ekonomi masyarakat desa (Afgani & Wanusmawatie, 2025).

Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar dalam kemandirian pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, dalam implementasinya di tingkat desa, masih banyak kendala yang dihadapi. Seperti rendahnya literasi koperasi, tata kelola yang lemah, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai koperasi. Menurut Saputri (2025), penguatan tata kelola dan kesadaran masyarakat merupakan aspek penting yang harus diprioritaskan agar koperasi benar-benar menjadi instrumen pembangunan desa.

Meskipun demikian, implementasi Koperasi Desa Merah Putih di tingkat lokal tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di Desa Pakisputih, misalnya, koperasi telah memiliki landasan hukum berupa akta pendirian dan struktur organisasi, tetapi hingga kini belum dapat beroperasi secara efektif. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya keputusan terkait unit usaha yang akan dijalankan. Berbagai alternatif usaha dinilai sudah banyak tersedia di desa, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pasar, dan fotokopian. Opsi yang tersisa, yaitu simpan pinjam, ditolak oleh perangkat desa karena dinilai berisiko tinggi terhadap kredit macet yang dapat membebani pengurus koperasi.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi. Banyak warga yang masih memandang koperasi sekadar wadah simpan pinjam tanpa memahami fungsi strategisnya sebagai lembaga ekonomi kolektif. Akibatnya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa maupun pihak eksternal belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini menimbulkan dilema: koperasi harus ada untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat, koperasi akan sulit berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) apa saja faktor penyebab Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pakisputih belum dapat beroperasi, (2) bagaimana tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait keberadaan koperasi desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dilema implementasi koperasi desa sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih agar berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar kewajiban administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan, khususnya terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pakisputih. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), wawancara informal dengan perangkat desa, kelompok ibu Fatayat NU, serta pemuda desa yang menjadi peserta sosialisasi koperasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk menggambarkan kondisi nyata koperasi desa, tingkat partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan operasional. Hasil analisis dipaparkan secara naratif dalam bentuk uraian mendalam agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti dan membantu dalam proses penarikan kesimpulan (Hasan et al., 2025). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan deskripsi komprehensif mengenai realitas Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pakisputih tanpa terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pakisputih belum bisa beroperasi

Berdasarkan hasil wawancara Mahasiswa KKN Kelompok 2 dengan pihak Desa Pakisputih, keberadaan Koperasi Desa *Merah Putih* merupakan sebuah keharusan administratif yang berlaku di seluruh desa di Indonesia. Koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memastikan adanya wadah kelembagaan dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi pemerintah menegaskan bahwa tanpa adanya koperasi, pencairan dana desa tidak dapat dilakukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa koperasi dijadikan prasyarat utama bagi jalannya program pembangunan berbasis desa. Dari perspektif kebijakan publik, aturan tersebut dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah dalam membangun kemandirian desa melalui penguatan lembaga ekonomi rakyat. Dengan demikian, pembentukan koperasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme pembangunan desa yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Menurut hasil pengamatan di Desa Pakisputih menunjukkan bahwa koperasi telah memenuhi aspek legalitas dan kelembagaan. Akta pendirian sudah dimiliki, struktur organisasi telah dibentuk, dan perangkat administratif lain juga tersedia. Namun, secara operasional koperasi belum dapat berjalan. Permasalahan utama terletak pada belum adanya

penentuan bidang usaha yang hendak dijalankan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aspek administratif dengan implementasi nyata di lapangan. Secara formal koperasi memang sudah dianggap “ada”, tetapi secara fungsional belum mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat desa. Kondisi ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak dapat hanya diukur dari kelengkapan dokumen, melainkan juga dari sejauh mana ia mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Jika ditinjau dari potensi lokal, sebagian besar kebutuhan masyarakat Desa Pakisputih telah tersedia. Masyarakat telah memiliki akses pada layanan kesehatan, pendidikan, pasar desa, hingga jasa fotokopi. Artinya, ruang bagi koperasi untuk bergerak dalam bidang-bidang tersebut relatif terbatas. Salah satu peluang usaha yang masih terbuka adalah sektor simpan pinjam. Namun, pihak pemerintah desa menyatakan keberatan apabila koperasi mengambil sektor ini, dengan alasan tingginya risiko kredit macet. Kekhawatiran ini dapat dipahami mengingat fenomena moral hazard dan rendahnya literasi keuangan masih menjadi kendala dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis komunitas. Apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru, baik bagi pengurus koperasi maupun masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan pilihan usaha menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan fungsi koperasi di desa ini.

Sehingga, situasi yang terjadi di Desa Pakisputih menggambarkan adanya dilema kebijakan. Di satu sisi, koperasi harus segera beroperasi agar tidak menghambat pencairan dana desa. Di sisi lain, pemilihan bidang usaha tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, karena kesalahan dalam menentukan arah usaha justru berpotensi membebani masyarakat maupun perangkat desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh syarat legalitas, melainkan juga oleh kesesuaian antara jenis usaha dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Apabila koperasi hanya menjadi lembaga formalitas, maka fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa tidak akan tercapai.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Desa Pakisputih perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai potensi lokal. Sektor pertanian merupakan salah satu pilihan realistis, mengingat sebagian besar penduduk desa masih bergantung pada aktivitas bercocok tanam. Koperasi dapat berperan dalam menampung hasil panen, melakukan pengolahan sederhana, serta membantu pemasaran ke pasar yang lebih luas. Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan jasa pendukung bagi aktivitas pertanian, misalnya penyediaan pupuk, bibit, atau alat pertanian dengan harga yang terjangkau. Pilihan lain yang dapat dikembangkan adalah usaha berbasis potensi khas desa, seperti kerajinan tangan atau makanan tradisional, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi produk unggulan desa. Alternatif-alternatif ini tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga memperkuat basis ekonomi lokal tanpa menimbulkan risiko tinggi seperti pada unit simpan pinjam.

Ketidakpastian dalam penentuan bidang usaha ini menunjukkan bahwa koperasi di Desa Pakisputih masih berada pada tahap awal perkembangan kelembagaan. Apabila tidak segera diatasi, koperasi berpotensi hanya menjadi lembaga formalitas tanpa fungsi nyata. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa, pengurus koperasi, serta partisipasi masyarakat dalam menentukan arah usaha yang sesuai. Selain itu, dukungan eksternal sangat penting, baik dari Dinas Koperasi maupun akademisi, untuk memberikan pendampingan terkait pemetaan potensi, penyusunan rencana bisnis, hingga manajemen risiko. Dengan adanya kolaborasi ini, Koperasi Merah Putih di Desa Pakisputih memiliki

peluang untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga benar-benar mampu mendukung tujuan pembangunan desa.

2. Tingkat Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KKN Kelompok 2 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan kepada ibu-ibu Fatayat NU dan juga kelompok pemuda di Desa Pakisputih merupakan langkah awal untuk mengenalkan kembali Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, mahasiswa mencoba memberikan penjelasan mengenai tujuan koperasi, perannya dalam penguatan ekonomi desa, serta potensi manfaat yang bisa diperoleh apabila koperasi benar-benar berjalan. Namun, dari hasil pelaksanaan sosialisasi dapat diamati bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat masih rendah. Kehadiran peserta dalam kegiatan sosialisasi memang cukup, tetapi keterlibatan mereka dalam diskusi, memberikan masukan, maupun mengajukan pertanyaan masih terbatas. Sebagian besar hanya mendengarkan tanpa memberikan respon aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya tertarik atau belum memahami secara jelas manfaat koperasi bagi kehidupan mereka.

Rendahnya antusiasme ini juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang cenderung menyamakan koperasi desa dengan koperasi lain pada umumnya yang hanya berfokus pada usaha simpan pinjam. Bagi warga, koperasi identik dengan pinjam-meminjam uang yang seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari, baik karena keterlambatan pembayaran maupun potensi kredit macet. Pandangan semacam ini membuat masyarakat kurang percaya dan cenderung bersikap hati-hati. Mereka merasa khawatir jika koperasi hanya akan menjadi beban baru, baik bagi pengurus maupun anggotanya, daripada menjadi solusi untuk peningkatan ekonomi.

Di sisi lain, dari pihak pemerintah desa sendiri hingga saat ini belum memberikan kejelasan mengenai unit usaha apa yang akan dikelola koperasi. Pemerintah desa masih dalam tahap mempertimbangkan jenis usaha yang tepat, karena sebagian besar kebutuhan warga sudah terpenuhi melalui usaha yang ada di desa, mulai dari pasar, layanan kesehatan, apotek, hingga lembaga pendidikan. Ketidakpastian ini berpengaruh langsung terhadap pemahaman masyarakat. Warga kesulitan melihat manfaat nyata dari keberadaan koperasi, karena belum ada gambaran jelas mengenai kegiatan ekonomi yang akan dijalankan. Akibatnya, sosialisasi yang dilakukan belum mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat secara signifikan.

Selain itu, pemerintah desa secara terbuka menyatakan keberatan untuk membuka layanan simpan pinjam. Pertimbangannya adalah risiko kredit macet yang dinilai cukup tinggi. Jika banyak warga yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu, hal tersebut akan mengganggu jalannya operasional koperasi, bahkan bisa menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat dan pengurus koperasi. Kekhawatiran ini membuat desa lebih memilih untuk menunda penentuan unit usaha, meskipun keputusan tersebut justru menghambat perkembangan koperasi itu sendiri. Situasi ini menjadikan koperasi berada pada posisi stagnan, karena masyarakat pasif menunggu keputusan dari desa, sementara desa belum berani mengambil langkah yang lebih tegas.

Dengan kondisi seperti ini, dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih sangat terbatas, dan hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi mereka. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan memang menjadi langkah awal yang positif, tetapi belum cukup untuk menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya koperasi. Tanpa adanya kejelasan dari pihak desa mengenai unit usaha yang akan dijalankan, masyarakat sulit diajak untuk terlibat lebih aktif. Oleh karena itu, tantangan

utama yang dihadapi saat ini bukan hanya pada rendahnya minat masyarakat, tetapi juga pada ketidakjelasan arah pengembangan koperasi yang membuat warga tidak melihat manfaat konkret dari keberadaan KDMP.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pakisputih menghadapi kendala yang cukup kompleks, baik dari aspek internal kelembagaan maupun eksternal berupa respons masyarakat. Dari sisi kelembagaan, koperasi memang telah memenuhi syarat administratif seperti akta pendirian dan struktur organisasi. Namun, secara operasional koperasi belum berjalan karena belum adanya penentuan jenis usaha yang akan dijalankan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara keberadaan koperasi secara legal dengan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih rendah. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga bersikap pasif, kurang antusias, serta memiliki persepsi negatif bahwa koperasi hanya identik dengan usaha simpan pinjam yang rawan kredit macet. Pandangan ini diperkuat dengan sikap pemerintah desa yang juga belum berani mengambil keputusan mengenai unit usaha, terutama karena kekhawatiran akan risiko kegagalan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat kesulitan melihat manfaat konkret dari koperasi, sehingga mereka belum terdorong untuk terlibat aktif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama koperasi di Desa Pakisputih belum beroperasi adalah kombinasi antara **ketidakjelasan arah usaha** dan **rendahnya pemahaman serta partisipasi masyarakat**. Kedua faktor ini saling terkait dan menciptakan stagnasi dalam perkembangan koperasi. Untuk itu, diperlukan kajian potensi ekonomi lokal yang lebih mendalam, pendampingan intensif dari pihak eksternal, serta sosialisasi berkelanjutan yang mampu mengubah persepsi masyarakat. Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, Koperasi Desa Merah Putih berpeluang besar untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22375–22383. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30167>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., Merjani, A., & Rahman, A. H. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.